

MENGGALI NILAI LOKAL DALAM BUDAYA JAWA PINGGIRAN UNTUK MENDUKUNG DEMOKRATISASI

Sofa Marwah

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya lokal yang sangat beragam. Keberagaman tersebut tercermin dari perbedaan etnik, agama, ras, bahasa dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Seiring perkembangan masa, nilai-nilai budaya juga bersinggungan dengan praktik politik. Konsepsi tentang budaya politik mengacu pada pengertian bahwa sikap politik dan pola perilaku diasumsikan memengaruhi hubungan warga dengan sistem politik. Konsepsi budaya politik dari Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam *The Civic Culture* sejauh ini masih menjadi studi dalam sub-disiplin ilmu politik yang sangat kuat (Gabriel Almond & Sidney Verba, 2015 ; baca juga Marc Hooghe, 2013). Kedua ilmuwan politik tersebut menekankan orientasi terhadap politik sangat penting untuk memelihara sistem politik demokrasi. *Civic culture* mencerminkan partisipasi politik warga yang tidak merusak otoritas pemerintah, karena warga negara menyadari bahwa keberlanjutan sistem politik membutuhkan kepatuhan dan tanggung jawab mereka.

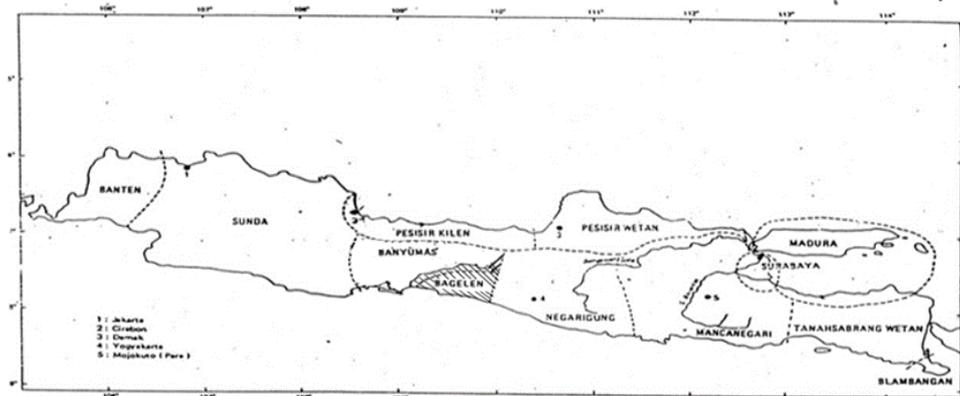
Sesuai dengan penjelasan teoritisasinya, budaya politik merujuk pada sikap warga negara, namun dalam praktiknya juga mencakup pola-pola perilaku yang berkaitan dengan sikap tersebut. Dalam konteks demikian, studi tentang budaya politik di Indonesia sudah banyak mendapatkan perhatian dari para ilmuwan politik. Beberapa diantaranya adalah studi Clifford Geertz (2017) yang dilaksanakan pada kurun waktu 1955 di kota kecil di Jawa Timur dengan nama samaran Mojokuto. Geertz menyebutkan penggolongan budaya politik masyarakat Jawa menjadi santri, abangan, priyayi. Adapun Harold Crouch (1979) menjelaskan mengenai budaya politik Indonesia bersifat neo-patrimonialistik. Dalam pandangannya, tatanan negara Indonesia mempunyai atribut modern dan rasionalistik, contohnya keberadaan birokrasi. Namun kekuasaan yang dipraktikkan Orde Baru dari pusat hingga daerah tampak sangat personalistik. Selanjutnya studi James Scott (1972) menyatakan bahwa budaya politik Indonesia mencerminkan hubungan *patron-klien*. Pola tersebut menunjukkan relasi dari dua kelompok yang tersegregasi, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga patron berkedudukan superior dan klien memiliki posisi yang inferior. Adapun studi Claire Holt, Benedict Anderson, dan

James Siegel (1972) menyebutkan bahwa sangat sulit untuk mengidentifikasi budaya politik di Indonesia dikarenakan atributnya kabur. Satu hal yang menjadi titik tolak adalah pola budaya yang dominan dan berasal dari kelompok etnis yang dominan pula, yaitu etnis Jawa. Dalam hal ini, etnis Jawa sangat mewarnai sikap, perilaku, dan orientasi politik elit di Indonesia.

Studi yang lebih baru tentang budaya politik di Indonesia dilakukan oleh William Liddle & Saiful Mujani (2000) yang menyebut budaya politik Indonesia sedang dalam transformasi dari budaya tradisional menuju modern. Studi yang menggali kebudayaan dan kekuasaan, paling banyak dipotret dari kebudayaan yang dominan, yaitu Jawa. Studi lainnya dilakukan Siti Zuhro dkk (2009) yang menggali nilai-nilai dalam budaya lokal dan relevansinya dengan demokrasi, yaitu di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Bali. Dalam studi tersebut ditunjukkan adanya nilai-nilai dalam budaya lokal yang mendukung demokratisasi atau sebaliknya nilai-nilai budaya lokal yang tidak sejalan dengan proses demokratisasi.

Tulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi studi tentang penelusuran nilai-nilai budaya lokal yang mendukung demokrasi di Indonesia, dengan memilih budaya Jawa pinggiran. Setidaknya, kebudayaan Jawa pinggiran relatif tidak banyak mendapatkan perhatian dari para ahli karena lebih fokus pada pusat kekuasaan Jawa yaitu Yogyakarta dan Solo. Studi ini memilih kebudayaan Jawa pinggiran yaitu budaya Bagelen di Jawa Tengah. Pengertian wilayah Jawa pinggiran mengacu studi Koentjaraningrat (1984) yang membagi variasi kebudayaan Jawa. Budaya Bagelen merupakan wilayah pinggiran yang terletak di wilayah *mancanegara*, jauh dari pusat kebudayaan Jawa yaitu Kasunanan Solo dan Kasultanan Yogyakarta (sebagai wilayah *negaragung*).

Dalam peta variasi regional kebudayaan Jawa, wilayah budaya Bagelen secara administratif mencakup Kabupaten Purworejo dan Kebumen. Apabila mencermati peta variasi kebudayaan Jawa tersebut, maka akan tampak bahwa kebudayaan Bagelen setidaknya mencakup Kabupaten Purworejo dan Kebumen (lihat Gambar 1 di bawah).



Gambar 1. Variasi Regional Kebudayaan Jawa

(Sumber : Koentjaraningrat, 1984)

Sulit memang untuk meneguhkan bahwa budaya Bagelen hanya mencakup masyarakat yang tinggal di daerah itu, karena sifat budaya yang mengalami akulturasi dan tidak berbatas secara administratif. Namun dapat dikatakan bahwa pusat kebudayaan Bagelen adalah Kabupaten Purworejo. Hal tersebut setidaknya tercermin dari keberadaan situs Nyai Bagelen di wilayah Purworejo yang menjadi salah satu cagar budaya yang dilindungi. Dalam kompleks petilasan Nyai Bagelen terdapat sejumlah makam kuno dan peninggalan sejarah Buddha yang berupa stupa-stupa berjumlah sembilan buah dengan ukuran stupa masing-masing yang berbeda dan dinyatakan sebagai peninggalan sejarah purbakala yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Selain itu, terdapat daerah dengan nama Desa Bagelen, yang masuk wilayah Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo. Keberadaan Kabupaten Purworejo sebagai pusat budaya Bagelen juga tercermin dari penemuan Prasasti Kayu Ara Hiwang. Prasasti tersebut ditulis dalam huruf dan bahasa Jawa kuno. Prasasti tersebut menginformasikan keterangan tanggal 5 Oktober 901 M dan kemudian tanggal tersebut menjadi dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Purworejo. Namun sejak tahun 2019, terdapat perubahan penetapan Hari Jadi Kabupaten Purworejo yang baru menjadi tanggal 27 Februari 1831. Terkait perubahan hari jadi kabupaten tersebut dapat dibaca dalam karya Peter Carey (2017). Adapun mengenai asal mula dan sejarah masyarakat Bagelen secara lengkap dapat dibaca dalam *Sejarah Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo* (tanpa tahun).

Keberadaan Bagelen sebagai budaya Jawa pinggiran, menjadikannya hampir tidak memiliki bukti tertulis yang menyatakan kebesaran nama Bagelen di masa lalu. Hal

tersebut sebagaimana dikatakan oleh Sudibyo, dosen ahli budaya dari Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta (<https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/ke-du/bagelen-nama-besar-yang-tidak-pernah-mencuat> 25 Juli 2019 diakses tanggal 1 Oktober 2020). Berkaitan dengan hal itu, Radix Penadi (1988) yang menulis buku *Bagelen dan Mataram Kuno* mencoba menelusuri kaitan wilayah tersebut dengan Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Mataram. Dalam studinya Penadi menjelaskan bahwa Bagelen menjadi salah satu wilayah pembangunan tempat ibadah sejak masa berkembangnya agama Hindu dan tempat ibadah agama Islam ketika Islam mulai masuk. Selain, wilayah Bagelen juga ditandai dengan keberadaan tokoh penyebaran agama dan penemuan berbagai ragam peninggalan candi, benda-benda kuno, dan kemudian masjid-masjid bersejarah.

Selanjutnya tulisan ini akan mengidentifikasi nilai-nilai budaya lokal dalam budaya Bagelen sebagai budaya pinggiran. Dalam konteks politik lokal, tulisan ini mengkaitkannya dengan proses demokratisasi. Untuk itu, tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian besar, yaitu bagian yang mengkaji keragaman unsur dalam budaya Bagelen yang secara harmonis dapat berpadu; selanjutnya bagian yang menggali nilai-nilai budaya lokal yang mendukung proses politik dapat berlangsung secara tertib dan damai. Terakhir tulisan ini melengkapinya dengan penutup yang menggarisbawahi pentingnya menggali nilai-nilai budaya lokal yang mendukung proses demokratisasi.

Paduan Keragaman dan Keharmonisan Unsur dalam Budaya Bagelen

Kebudayaan Bagelen tidak bisa dipisahkan dari dua tradisi kebudayaan di sebelah kanan dan kirinya. Dalam hal ini, budaya Bagelen bersanding dengan pusat kebudayaan Jawa di sebelah timur dan budaya Banyumas di sebelah baratnya. Gejala perbedaan budaya antara lain dapat diidentifikasi dengan bahasa yang digunakan. Tatanan bahasa Jawa memiliki strata yang kuat untuk membedakan seseorang berbicara dengan siapa dan dari kalangan apa. Adapun bahasa Banyumas, dikenal lebih terbuka dan tidak mengenal strata sosial penggunaannya. Bahkan bahasa Banyumas bersifat egaliter digunakan untuk antar individu, istri terhadap suami, adik terhadap kakak, dan seterusnya. Adapun budaya Bagelen terletak di antara keduanya sehingga menunjukkan wilayah budaya peralihan. Hal tersebut tampak pula pada penggunaan bahasa sehari-hari yang digunakan.

Sebagai wilayah yang berada di luar pusat kekuasaan atau *mancanegara*, budaya Bagelen mengandung nilai-nilai egaliter dibanding daerah pusat kekuasaan Jawa. Nilai-nilai kesetaraan yang ditunjukkan dengan lapisan sosial masyarakat yang tidak terlalu kuat mengarah pada hubungan antar kelas sosial yang lebih saling menghargai. Salah satunya tercermin dari perbedaan bahasa antar kelas sosial yang tidak terlalu ketat. Seperti diketahui bahwa bahasa Jawa memiliki tiga tingkatan bahasa, yaitu *ngoko*, *kromo madya*, *kromo inggil*. Pada masing-masing tingkatan bahasa menunjukkan kelas sosial yang menggunakan bahasa tersebut. Bahasa *ngoko* untuk kalangan bawah, bahasa *kromo madya* untuk kelas menengah dan *kromo inggil* untuk kalangan atas. Sartono Kartodiharjo (1992) menyebutkan bahwa bagi rakyat biasa menggunakan bahasa halus ditujukan kepada kelompok atasnya sebagai pemegang kuasa, sebaliknya kalangan atas sebagai pemegang kekuasaan menggunakan bahasa kasar kepada kalangan bawah.

Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah budaya Bagelen, penggunaan bahasa Jawa tidak lagi mencerminkan kelasnya. Justru yang dominan adalah bahasa pergaulan sehari-hari yang bebas dan tidak menunjukkan tingkatan kelas penggunaannya. Kondisi demikian tercermin dari penggunaan bahasa sehari-hari dan dalam tata cara pergaulan masyarakat dalam wilayah budaya Bagelen, misalnya masyarakat di kawasan pantai Pesisir Selatan Jawa. Sebagian wilayah Bagelen yang terdiri dari pantai juga mencirikan masyarakat yang lebih bebas dan kurang mencerminkan tatanan *anggah ungguh* dalam sudut pandang Jawa-sentris. Jadi bahasa Bagelen adalah bahasa peralihan dari bahasa Jawa pusat (Solo-Yogyakarta) dengan bahasa Banyumas. Logat atau dialek yang muncul dalam bahasa Bagelen merupakan campuran Jawa dan Banyumas, dengan pembagian di sebelah Bagelen timur lebih bernuansa dialek Jawa, sedangkan bagian Bagelen barat lebih menonjol dialek Banyumas. Adapun batas peralihannya adalah daerah yang disebut Kutawinangun (Sugeng Priyadi, 2004). Perpaduan nilai budaya Bagelen dari unsur-unsur yang membentuknya merefleksikan tatanan yang lebih bebas dan kurang terstratifikasi secara sosial. Hal demikian menampakkan keharmonisan karena keragaman unsur budaya yang mendukungnya.

Selain itu, unsur-unsur di wilayah Bagelen juga terlihat dari perpaduan unsur Islam, Kristen, dan tradisionalisme. Seperti banyak wilayah lain di Pulau Jawa, perkembangan Islam di wilayah Bagelen juga bersentuhan dengan adat istiadat lokal. Dalam hal ini, terdapat tiga situs utama yang menunjukkan awal perkembangan Islam di

masa lalu, yaitu petilasan Sunan Geseng, Masjid Sunan Geseng, dan Masjid Santren (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, 2008). Dalam perkembangan Islam, terdapat potret akulturasi Islam dengan budaya lokal Bagelen melalui upacara tradisional, kesenian khas, cerita rakyat, dan sebagainya. Sebagian masyarakatnya mengenal praktik Islam kejawen, yaitu Islam yang masih mengadopsi tradisi sebelum Islam masuk dan berkembang di tanah Jawa. Demikian pula bangunan masjid peninggalan masa Kerajaan Mataram yaitu Masjid Sunan Geseng dan Masjid Santren, juga menggunakan arsitek tradisional Jawa.

Pada masa perang Jawa tahun 1825-1830, kehidupan masyarakat Bagelen ditandai dengan berlangsungnya perang Diponegoro. Perang Diponegoro sendiri berlangsung dengan diwarnai nilai-nilai spiritualisme Jawa dan Islam. Studi Peter Carey (2016) menunjukkan seorang perempuan sufi yang menjadi pengikut tarikat Satariyyah dikenal sebagai pengajar agama Islam sekaligus praktik spiritual Jawa, adalah yaitu Ratu Ageng, permaisuri Sultan Hamengku Buwono I. Ratu Ageng adalah nenek buyut Pangeran Diponegoro yang mengasuh dan mengajarkan Diponegoro tentang ajaran Islam dan spiritualisme Jawa. Pada masa perang tersebut, wilayah Bagelen menjadi daerah rebutan elit politik yang penting.

Dalam peta kekuasaan Mataram, setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, wilayah Bagelen berada dalam peta politik yang rumit, karena sebagian wilayahnya masuk Kasunanan Surakarta dan sebagian lainnya masuk wilayah Kasultanan Yogyakarta. Pada masa itu, daerah Bagelen adalah wilayah *mancanegara* yang menjadi sumber hasil produksi pertanian bagi daerah pusat kekuasaan (*negaragung*). Ketika Perang Jawa berakhir, studi dari Ittihadiyah (2012) mencatat masyarakat Bagelen memasuki tahapan baru dalam perjalanan sejarah kolonial yang dihadapi, yaitu masa Tanam Paksa (1830-1870), berupa perubahan secara struktural maupun kultural, baik secara sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun agama. Dalam masa ini, agama Kristen yang dibawa oleh kolonial Belanda mulai menguat pengaruhnya di masyarakat.

Dalam perkembangannya, pengaruh agama Kristen di wilayah Bagelen cukup kuat. Masyarakat pemeluk agama Kristen di wilayah ini cukup banyak. Hal tersebut relatif berbeda dengan wilayah di luar Bagelen, khususnya di Tanah Jawa, di mana pemeluk agama Islam sangat dominan jumlah pemeluknya. Perkembangan Kristen di Purworejo menjadikan Purworejo sebagai pusat *zending* atau gereja-gereja Protestan

Belanda. Di Kabupaten Purworejo, bahkan di beberapa desa telah menjadi pusat pengembangan agama Kristen Kerasulan sejak zaman dulu. Desa yang menjadi pusat perkembangan Kristen misalnya Desa Karangjoso Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.

Perkembangan agama Kristen di Purworejo juga tidak lepas dari ketokohan Kyai Sadrach sebagai pelopor Gereja Kristen Jawa di wilayah Bagelen. Kyai Sadrach adalah seorang tokoh penginjil. Meskipun seorang misionaris, namun panggilan kyai yang umumnya digunakan untuk menyebut tokoh Islam tetap melekat (*Sejarah Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo*, tanpa tahun). Dalam hal ini, bekas santri atau dengan kata lain bekas seorang Muslim, Kyai Sadrach, menjadi muara dari sejarah awal perkembangan Kristen di wilayah tersebut. Konsep santri mungkin dapat diselaraskan dengan pemetaan kultural masyarakat Jawa dalam studi Clifford Geertz (2017) yang dilakukan pada tahun 1955 dengan membuat skema peta budaya Jawa terbagi menjadi tiga aliran santri, abangan, dan priyayi. Kyai Sadrach adalah seorang santri yang kemudian masuk Kristen dan selanjutnya mengambil posisi sebagai misionaris. Pada 1869 Kyai Sadrach menyiarkan Kristen di Purworejo, bersama-sama tokoh Kristen perempuan yaitu Nyonya Philips dan Nyonya Oostrom Philips (Peter Carey, 2017).

Ragam perpaduan antara Kristen, tradisionalisme, Islam di daerah Purworejo hingga saat ini masih bertahan. Sebuah keeksotikan yang patut menjadi perenungan bersama. Bahkan perpaduan *apik* antara Islam, Kristen dan tradisionalisme di daerah tersebut hingga saat ini masih diperingati dalam penyelenggaraan Kirab Bagelen untuk memperingati berdirinya gereja tertua di Kabupaten Purworejo sejak tahun 1900.

Representasi Nilai-nilai Demokratis dalam Kebudayaan Bagelen

Sejalan dengan keragaman budaya di Indonesia, budaya politik di Indonesia juga bervariasi. Maswadi Rauf (2009) menunjukkan bahwa terdapat budaya politik lokal yang memiliki lebih banyak nilai-nilai yang sesuai dengan budaya politik demokratis, namun terdapat budaya politik lokal yang memiliki nilai-nilai budaya demokrasi yang sedikit. Kondisi demikian dapat berdampak pada pelaksanaan demokrasi di daerah. Artinya, proses politik lokal seperti pemilihan kepala daerah langsung (pilkada), ada yang berhasil berjalan secara demokratis, namun ada pula daerah yang menghadapi banyak masalah dalam pilkada. Mengacu pada teoritisasi budaya politik dan demokrasi menurut Larry

Diamond (1994), budaya politik memang bukan menjadi faktor penentu terhadap keberhasilan demokrasi, namun budaya politik menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian demokrasi. Dalam konteks demikian, tatanan asli masyarakat dapat menjadi faktor yang memengaruhi, walaupun tidak menentukan, terhadap pandangan mengenai kekuasaan dan perilaku-perilaku di sekitarnya. Gambaran dari Maswadi Rauf terhadap peta budaya politik di Indonesia menunjukkan pentingnya mempelajari nilai budaya politik lokal dan capaian demokrasi di sebuah daerah.

Masyarakat dalam budaya Bagelen berbeda dengan budaya Jawa khususnya di pusat kebudayaannya, yang dikenal memiliki nilai-nilai feodalisme. Dalam kehidupan politik modern, gejala feodalisme tampak pada interaksi antara rakyat dan penguasa atau antara bawahan dan atasan, baik pada lembaga birokrasi tradisional maupun modern di semua tingkatan. Budaya tersebut dianggap sebagai warisan budaya masa lalu, di lingkungan kerajaan seperti Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta yang kemudian juga dipupuk dan dilestarikan oleh kolonial Belanda untuk mempertahankan penjajahan.

Dalam konteks kebudayaan dan praktik politik lokal, wilayah budaya Bagelen dikenal sebagai daerah yang aman dan tidak pernah terjadi konflik politik dalam penyelenggaraan kegiatan politik, seperti pemilihan legislatif maupun pemilihan bupati. Hal yang relatif mencolok tampak di wilayah budaya tersebut terutama pada level masyarakat adalah kehidupan masyarakat yang damai dan tidak bergejolak. Perpaduan kondisi lokal dari tatanan nilai di wilayah Bagelen dan situasi politik yang damai tidak pernah terjadi kericuhan, mendorong pentingnya mengulas tentang nilai-nilai budaya politik yang mendukung demokrasi di wilayah tersebut. Dalam hal ini nilai-nilai yang lebih egaliter dapat berjalan beriringan dengan demokrasi.

Proses politik lokal yaitu pemilihan kepala daerah di Kabupaten Purworejo dapat menjadi cerminan bagaimana nilai-nilai budaya lokal ikut berkontribusi bagi tercapainya demokratisasi di tingkat daerah. Nilai-nilai budaya politik dapat dipandang secara fungsional ikut mempengaruhi perilaku politik seperti halnya kontribusi budaya politik terhadap pembentukan demokrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, kita dapat mengulasnya dari fenomena yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Purworejo. Dalam hal ini pilkada di Kabupaten Purworejo telah berlangsung sebanyak tiga kali sejak kekuasaan Orde Baru jatuh.

Pilkada pertama saat era reformasi, yaitu Pilkada Tahun 2000, berlangsung dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara oleh DPRD. Pada saat itu, pilkada yang berjalan menampilkan situasi yang unik. Nama calon wakil bupati Kelik Sumrahadi, dicantumkan sebagai nama ketiga kandidat pasangan bupati dan wakil bupati yang berlaga. Pada akhirnya pasangan Marsaid dan Kelik Sumrahadi berhasil terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo untuk periode 2000-2005. Kelak pada Pilkada Tahun 2005, Kelik Sumrahadi berhasil menjadi Bupati Purworejo melalui pilkada langsung untuk pertama kalinya di daerah tersebut. Saat itu, Kelik Sumrahadi berhasil mengalahkan mantan bupati pasangannya, yaitu Marsaid.

Pilkada Tahun 2010 di Kabupaten Purworejo juga berlangsung damai dan tertib. Pada saat itu, mantan wakil bupati pada masa Bupati Kelik Sumarhadi, yaitu Mahzun Zein berhasil memenangkan pilkada Purworejo (<https://kpud-purworejokab.go.id/images/plenopilkada2010> diakses tanggal 1 November 2020). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu, pilkada berlangsung hingga dua putaran karena pada saat putaran pertama berlangsung, belum ada pasangan kandidat yang berhasil mencapai suara mayoritas.

Sebagai informasi, Pilkada Purworejo Tahun 2010 diikuti oleh pasangan kandidat yang banyak, yaitu mencapai 9 (sembilan) pasangan. Adapun pada Pilkada Tahun 2015, pasangan yang memenangkan pilkada adalah pasangan Agus Bastian dan Yuli Hastuti (<https://kpud-purworejokab.go.id/images/pilbuppurworejotahun2015/hasil pleno> diakses tanggal 1 November 2020). Pada saat itu, pilkada diikuti oleh 3 (tiga) pasangan bupati dan wakil bupati.

Pelaksanaan pilkada yang berlangsung di daerah tersebut damai dan kondusif. Demikian pula situasinya ketika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Hingga pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, daerah Purworejo dikenal sebagai wilayah yang kondusif yang menjadi barometer politik Provinsi Jawa Tengah karena terjaga keamanan dan kenyamanan dalam kontestasi politik lokal yang diselenggarakan (<https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/ke-du/purworejo-hadapi-tahun-politik-dengan-kebersamaan> tanggal 28 Maret 2018 diakses tanggal 1 November 2020). Merujuk pada Robert Putnam (1971); (lihat juga Marijan, 1999), kehadiran *civic culture* menjadi penentu kinerja pemerintah. Di daerah yang memiliki budaya politik demikian, pemerintah tampak merespon secara efektif tuntutan warganya. Tentu tulisan

ini tidak memiliki data yang sampai menjangkau elemen-elemen budaya politik sebagaimana Robert Putnam mengkajinya. Namun demikian, gambaran tentang ketertiban dan kenyamanan proses politik, setidaknya mengindikasikan hadirnya nilai budaya politik, yaitu partisipasi politik yang diiringi kepatuhan dan tanggung jawab.

Selain itu, elaborasi nilai-nilai demokrasi yang tampak dalam kehidupan masyarakat Bagelen, juga mencerminkan nilai-nilai akomodatif, toleransi dan mau berkompromi dalam kehidupan mereka. Hal tersebut sejalan dengan uraian dari Larry Diamond (1994) mengenai nilai-nilai budaya politik yang bukan faktor penentu demokrasi, namun agar demokrasi substansial dapat tercapai, maka proses politik memerlukan nilai-nilai budaya tersebut. Dalam hal ini demokrasi memerlukan seperangkat nilai politik dan orientasi dari masyarakat mencakup nilai moderasi, toleransi, peradaban, pemahaman, partisipasi dan sebagainya.

Gambaran tentang nilai-nilai akomodatif, toleransi, kompromi dapat dilihat perpaduan seni budaya lokal dengan tradisi keIslaman. Sebagian masyarakatnya masih mengenal praktik-praktik Islam kejawen, yaitu Islam yang masih mengadopsi praktik-praktik tradisi sebelum Islam masuk dan berkembang di tanah Jawa. Kondisi demikian direpresentasikan dengan penggabungan ritual keagamaan dalam wayang kulit, seni *dolalak* di Purworejo diiringi lagu tradisional dan *sholawatan*, seni *jamjaneng*, *angguk* dan *rebana* yang menggabungkan seni tradisional dan Islam. Masyarakat Bagelen hidup dalam lingkungan pertemuan agama-agama besar, namun tetap dapat hidup damai tidak bergejolak.

Mereka memiliki perbedaan dalam hal keagamaan yaitu Islam, Kristen dan Hindu Budha. Seperti disinggung di atas, beberapa desa di Kabupaten Purworejo, menjadi pusat pengembangan agama Kristen Kerasulan sejak zaman dulu. Perkembangan agama Kristen di wilayah tersebut tidak lepas dari ketokohan Kyai Sadrach sebagai pelopor Gereja Kristen Jawa di wilayah Bagelen. Adapun perkembangan Islam di wilayah Bagelen terutama lebih menonjol di kawasan pesisir selatan Jawa. Gambaran utuh mengenai perpaduan ketiganya, yaitu adat istiadat, Islam dan Kristen menjadi gambaran bagaimana sesungguhnya nilai-nilai akomodatif, toleransi dan kompromi yang sangat menunjang demokrasi dimiliki oleh masyarakat Bagelen. Sejalan dengan keegaliterian masyarakat Bagelen dibanding dengan nilai-nilai Jawa pusat kekuasaan yang feodalistik, maka budaya Bagelen lebih mengandung nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan ekspresif.

Sedangkan masyarakat Jawa yang hidup di lingkaran *negaragung* atau pusat kekuasaan (Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta) lebih identik dengan budaya paternalistik yang kurang memberi kebebasan bagi warga masyarakat. Dalam konteks masyarakat yang kuat dalam strata sosial, budaya paternalistik mencerminkan bagaimana elit memiliki peran yang lebih menentukan daripada rakyat kecil, termasuk dalam kehidupan politik. Terlebih dalam kehidupan ekonomi dan pendidikan, seringkali kehidupan kaum elit lebih baik daripada rakyat kecil. Hal tersebut semakin menjadikan antar kelas atas dan kelas bawah tersegregasi secara kuat. Bila kondisi ini yang terjadi dan dilestarikan secara terus menerus, maka demokrasi akan sulit ditegakkan dalam kehidupan politik.

Budaya politik bukanlah faktor penentu dalam demokrasi. Namun demikian agar proses demokratisasi dapat berjalan membutuhkan dukungan dari nilai-nilai budaya lokal. Demokrasi dapat tercapai dengan dukungan seperangkat nilai, kepercayaan, dan sikap terhadap praktik politik yang berjalan. Studi yang dilakukan oleh Siti Zuhro dkk (2009) menunjukkan budaya politik dan implikasinya pada praktik politik di berbagai daerah di Indonesia juga berbeda-beda. Dalam hal ini terdapat perubahan dan kesinambungan nilai-nilai budaya politik lokal dan demokrasi lokal yang berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia.

Di Jawa Timur yang memiliki budaya egaliteranisme dan ekspresif, nilai-nilai budaya tersebut memberikan pengaruh terhadap ekspresi dan perilaku warga masyarakat. Proses politik berlangsung secara damai dan demokratis. Demikian pula yang terjadi di Sumatra Barat. Masyarakat di daerah tersebut memiliki budaya lokal yang serupa dengan masyarakat Jawa Timur, yaitu cenderung egaliter dan ekspresif. Nilai-nilai toleransi sangat penting untuk membentuk masyarakat demokratis, karena dengan nilai-nilai tersebut, ketidakpercayaan dan konflik dapat diminimalisir. Dengan kata lain, nilai tersebut penting untuk menyeimbangkan konflik dan kebutuhan untuk mencapai konsensus. Adapun untuk wilayah Sulawesi Selatan, hasil studi Siti Zuhro dkk (2019) menunjukkan bahwa masyarakat masih memegang nilai-nilai patrimonialisme yang cukup kuat. Masih kuatnya budaya patrimonial menjadikan demokrasi di daerah tersebut kurang berkembang pesat. Proses politik lokal yang terjadi di wilayah tersebut cenderung diwarnai kekerasan yang mengarah pada kekerasan fisik.

Kehidupan masyarakat bawah di Jawa termasuk di wilayah budaya Bagelen, secara umum juga masih memiliki nilai-nilai musyawarah dan gotong royong. Dalam banyak hal, kedua nilai tersebut masih cukup mengedepan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Studi dari Mattulada (1986) menunjukkan bahwa musyawarah dan gotong royong sebagai nilai-nilai demokrasi yang masih hidup dalam budaya politik dan telah dipraktikkan lama dalam proses politik di tingkat lokal. Tradisi musyawarah dan mufakat dengan segala bentuk variannya, telah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu, pada masa kerajaan hingga sekarang ini, terutama di daerah perdesaan. Oleh karena itu terdapat anggapan bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya sudah mengenal nilai-nilai budaya berdemokrasi dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan politik, nilai-nilai budaya yang mendukung demokrasi terkandung dalam kebudayaan lokal. Dalam konteks tulisan ini, adalah nilai-nilai budaya lokal masyarakat Bagelen sebagai wilayah pinggiran dalam kebudayaan Jawa yang dapat mendukung demokrasi. Dengan demikian, mengkaji, merawat dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal untuk mendukung proses politik di tingkat daerah sangat diperlukan untuk mencapai politik Indonesia yang lebih demokratis. Hal yang perlu diingat bahwa budaya politik jauh dari anggapan fenomena yang tidak berubah. Larry Diamond (1994) mencatat bahwa perubahan sosial ekonomi, mobilisasi sosial dan kewargaan, praktik institusional, pembelajaran politik, dapat mentransformasikan nilai-nilai budaya politik secara bertahap. Untuk itu merawat dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal menjadi keniscayaan dalam konteks pencapaian demokratisasi yang lebih baik.

Penutup

Pada akhirnya tulisan ini menekankan bahwa sangat mungkin nilai-nilai budaya lokal dapat menunjang tercapainya demokrasi dalam proses politik di tingkat lokal. Nilai-nilai budaya lokal ditunjukkan dalam wilayah budaya Jawa pinggiran yang jauh dari pusat kekuasaan budaya Jawa, yaitu Keraton Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Justru dalam masyarakat kecil, mereka tampak lebih memiliki nilai-nilai yang lokal yang setara dan bebas, dan oleh karenanya pencapaian demokrasi lebih dimungkinkan. Berbeda dengan pusat kebudayaan Jawa yang memiliki nilai-nilai yang feodal dan paternalistik,

nilai-nilai budaya Jawa pinggiran yaitu Bagelen lebih mengandung nilai-nilai keegaliteran.

Secara lebih spesifik, nilai-nilai budaya lokal yang mendukung demokrasi antara lain, kebebasan, kesetaraan, ekspresif, akomodasi, toleransi dan mau berkompromi, terkandung dalam budaya Bagelen. Selain itu, pada masyarakat perdesaan, seperti umumnya masyarakat Jawa dan Indonesia, nilai-nilai kegotongroyongan dan sikap mau bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan juga nampak dalam budaya perdesaan masyarakat Bagelen. Budaya memang bukanlah sesuatu yang statis, seiring dengan perubahan zaman, nilai-nilai budaya tentu dapat bergeser. Dalam hal ini faktor sosial, ekonomi, institusi, dan pengalaman menjadi bagian yang dapat mempengaruhi pergeseran tersebut. Untuk itu, terus menggali dan memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal dalam berbagai wilayah di Indonesia sangat penting demi meraih demokrasi substansial yang sesungguhnya dalam kehidupan politik.

Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel, Sidney Verba, 2015. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Princeton: Princeton University Press.
- Carey, Peter & Hoube, Vincent. 2016. *Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX*, Jakarta : Gramedia.
- Carey, Peter. 2017. *Sisi Lain Diponegoro: Babad Kedung Kebo dan Historiografi Perang Jawa*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Crouch, Harold, 1979, "Patrimonialism and Military Rule in Indonesia", *World Politics*, Vol.31. No.4 1979, 571-587.
- Diamond, Larry, 1994. *Political Culture and Democracy in Developing Countries*. Boulder London : Lynne Rienner Publishers.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2008, *Benda Cagar Budaya*, Purworejo.
- Geertz, Clifford, 2017. *Agama Jawa (The Religion of Java)*, Jakarta : Komunitas Bambu.
- Holt, Claire, Anderson, Benedict, & Siegel, James T, 1972. *Political Culture in Indonesia*, Ithaca: Cornel University Press,

- Hooghe, Marc. 2013. "Budaya Politik", dalam *Ilmu Politik : Dalam Paradigma Abad ke-21(21st Century Political Science: A Reference Handbook)*, Ishimaya, John.T & Breuning, Marijke, Jakarta: Kencana Grup, 335-347.
- Ittihadiyah, Himayatul, 2012. "Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950): Dinamika Sosial Politik dan Ekonomi di Bekas Wilayah Negaragung Kasultanan Mataram Islam", *Thaqāfiyyāt*, Vol. 13, No. 2, 223-255.
- Kartodiharjo, Sartono, 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat, 1984. *Kebudayaan Jawa*, Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Liddle, William & Mujani, Saiful, 2000. "Islam, Kultur Politik dan Demokratisasi". *Demokrasi dan HAM* Vol 1, No. 1, 132-161.
- Mattulada, 1986." Demokrasi dalam Tradisi Masyarakat Indonesia", dalam Amin Rais, *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta : LP3ES.
- Marijan, Kacung. 1999. "The Study of Political Culture in Indonesia", *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik* Vol. 12 No. 2, 57-66.
- Penadi, Radix, 1988. *Bagelen dan Mataram Kuno*. Purworejo: Lembaga Study dan Pengembangan Sosial dan Budaya.
- Priyadi, Sugeng, 2004. *Sejarah dan Kebudayaan Masyarakat Kebumen*, Yogyakarta: Jendela.
- Putnam, Robert, 1971. "Studying Elite Political Culture: The Case of Ideology," *The American Political Science Review*, Vol LXV.
- Rauf, Maswadi, "Mengungkapkan Hubungan Budaya Politik Lokal dan Demokrasi", dalam Zuhro, Siti dkk, 2009. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Scott, James C.1972. "Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia", dalam Steffen W. Schmidt, James C. Scott (eds.), *Friends, Followers and Factions a Reader in Political Clientalism*, Berkeley: University of California Press.

Sejarah Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo, tanpa tahun.

Zuhro, Siti dkk, 2009. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kestinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Sumber internet:

<https://kpud-purworejokab.go.id/images/plenopilkada2010> diakses tanggal 1 November 2020).

[https://kpud-purworejokab.go.id/images/pilbuppurworejotahun2015/hasil pleno](https://kpud-purworejokab.go.id/images/pilbuppurworejotahun2015/hasil_pleno) diakses tanggal 1 November 2020.

<https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/ke-du/purworejo-hadapi-tahun-politik-dengan-kebersamaan> diakses tanggal 1 November 2020.

<https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/ke-du/bagelen-nama-besar-yang-tidak-pernah-mencuat> diakses tanggal 1 Oktober 2020.